

C. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN

1 Produk hukum daerah yang mengatur mengenai:

a. menjamin ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Usaham Milik Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penataan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa, beserta peraturan perubahannya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, beserta peraturan perubahannya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

b. partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat, dalam pengambilan keputusan/kebijakan

Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

2 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang bantuan keuangan partai politik

- Alokasi bantuan keuangan partai politik tingkat kab/kota Rp.

- Jumlah suara sah x Rp. 1.500,- Rp.

3 Partisipasi masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat dalam pengambilan keputusan/ kebijakan

Ada Tidak Ada

4 Terdapatnya pelibatan masyarakat yang berasal dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau masyarakat adat dalam penyusunan produk hukum daerah

Ada Tidak Ada

5 Proporsi jumlah perempuan yang dicalonkan di dalam pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota oleh partai politik

- Jumlah perempuan bakal calon anggota DPRD	179
- Jumlah bakal calon anggota DPRD	441

Demikian data capaian pada hak turut serta dalam pemerintahan ini diberikan untuk dipergunakan didalam penilaian daerah kabupaten/kota Peduli HAM

Karanganyar, 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUTARNO, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630103 198812 1 00